

SERAMBI INDONESIA : 13 FEBRUARI 2017

JAKARTA - Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rahayu Puspasari menandatangani perjanjian kerja sama operasional dan penyerahan aset bekas PT Arun sebagai aset milik negara kepada PT Patriot Nusantara Aceh (PT Patna) selaku Badan Usaha Pengelola dan Pengembangan (BUPP) serta kerja sama investasi di dalam KEK Arun-Lhokseumawe.

Penandatanganan kerja sama dengan Direktur Utama PT Patna, Firman Prabowo ini di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (12/2). Turut menyaksikan penandatanganan MoU ini, Kemenko Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Darmin Nasution, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Aceh Utara M Thaib, Wali Kota Lhokseumawe diwakili Asisten I, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Ir Iskandar MSc yang juga Sekretaris Dewan KEK Arun, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, dan sejumlah pejabat dari kementerian, lembaga, termasuk konsorsium BUMN pengusung KEK Arun.

Setelah penandatanganan MoU itu dilanjutkan penandatanganan MoU investasi antara PT Pelindo I selaku pemegang saham BUPP dengan empat investor, yakni PT Aceh Makmur Bersama meliputi bidang pengolahan CPO, PT Sinergi Tangguh Alam Raya di bidang usaha plywood, PT Eas Kontinent Gas Indonesia di bidang usaha LPG Pressurized dan Pabrik Bootling LPG, serta PT Prosperity Building Material di bidang logistik pengantongan semen.

Gubernur Irwandi mengharapkan kesepakatan ini menjadi awal baik dalam mendukung percepatan realisasi pengembangan KEK Arun-Lhokseumawe. "Ini menandai era industri Aceh setelah habisnya masa LNG Arun," kata Irwandi menjawab Serambi.

Menurut Irwandi dengan ditandatanganinya MoU antara LMAN dengan PT Patriot Nusantara Aceh, maka operasional KEK Arun-Lhokseumawe sudah dapat berjalan. "Dengan demikian pada semester II tahun tahun 2018 diharapkan ground breaking proyek-proyek di KEK Arun Lhokseumawe sudah dapat diresmikan oleh Bapak Presiden," ujar Irwandi.

Di hadapan Kemenko Perekonomian, Gubernur Irwandi antara lain mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun, lima prioritas investasi yang akan dikembangkan di kawasan tersebut, yaitu bidang pengolahan ekspor minyak, gas dan energi, bidang Petrokimia, bidang logistik dan pelabuhan, bidang industri pengolahan (agro industri) serta bidang Industri kertas.

Sejalan dengan tujuan itu, lanjut gubernur, telah dilakukan sejumlah langkah langkah-langkah,

di antaranya melakukan koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai pihak, sehingga kini telah terbentuk Administrator KEK Arun Lhokseumawe yang juga telah mendapat limpahan kewenangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bidang perizinan.

Adapun kewenangan dari BKPM dan Kementerian Perdagangan kepada Administrator KEK Arun-Lhokseumawe ini akan dilimpahkan paling lambat akhir Februari 2018.

“Kemudian, empat lembaga selaku konsorsium pengelola KEK Arun Lhokseumawe, yaitu PT. PIM, PT Pertamina, PT Pelindo I dan PDPA telah membentuk Badan Usaha Pengelola dan Pembangunan (BUPP) KEK, yakni PT Patna selaku pembangun dan pengelola. Perusahaan ini telah resmi berkantor di kawasan eks Kilang Arun,” ujar gubernur.

Selain itu, gubernur juga mengatakan status lahan di lokasi kawasan KEK Arun semuanya telah tersertifikasi. Total lahan KEK Arun 2.622,48 Ha, termasuk 906,32 Ha lahan kosong terdiri atas milik PT Arun 540 Ha, milik PT.Pertamina/ Humpus Aromatik 81 Ha, PT Pelindo I seluas 17,82 Ha, PT PIM 126,5 Ha, PT AAF 91 Ha, dan PT KKA 50 Ha.

Sementara itu, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib yang akrab disapa Cek Mad, menjanjikan keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Aceh Utara. Ia mengimbau investor domestik berduyun-duyun berinvestasi di KEK Arun. “Kita jamin keamanan, kenyamanan dan kepuasan berinvestasi di Aceh. Itu jadi tugas saya selaku bupati,” kata Muhammad Thaib kepada Serambi.

Ia juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar merawat investasi-investasi yang masuk. “Kita sekarang memasuki era industri lagi di Arun Lhokseumawe. Ini akan memberi dampak sangat penting bagi perekonomian kita,” kata Bupati Thaib.

Bupati mengaku lebih mengharapkan investor dalam negeri daripada investor luar negeri “Mari kita dahulukan yang dalam negeri. Saya lebih suka apabila investor masuk dari Jawa dan daerah lainnya, daripada dari luar negeri,” katanya.

Sedangkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan KEK Arun dirancang untuk mempercepat pengembangan kawasan dan industri di luar Pulau Jawa. Ia menilai KEK Arun sudah lebih mudah dan lebih cepat berkembang karena tak memiliki persoalan apapun lagi mengenai lahan. “Sebab lahan yang digunakan adalah lahan milik negara, tidak perlu ada pembebasan lagi,” ujarnya seraya menyebutkan hal ini berbeda dengan KEK daerah lain yang masih bermasalah soal lahan.

<http://aceh.tribunnews.com/2018/02/13/4-investor-investasi-untuk-kek-arun>